

Sengketa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres Menurut Konsep *Amicus curiae*

Ariq Naufal

Afiliasi: Mahasiswa Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200106034@student.ar-raniry.ac.id

Riza Afrian Mustaqim

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Email: riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

T. Surya Reza

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Email: t.suryareza@ar-raniry.ac.id

Abstract

The Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning additional provisions for office experience from election selection within the minimum age requirement for presidential and vice presidential candidates, has raised controversy because it is allegedly influenced by certain political factors of interest and alleged conflicts of interest among Constitutional Court judges. The problem studied in this study is how the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the additional provisions of office experience from election selection within the minimum age requirement for presidential / vice presidential candidates affects the general election process in Indonesia and how the concept of amicus curiae can be applied in election disputes against the minimum age requirement for presidential / vice presidential candidates. This article uses normative legal research methods and case approaches. The results of this study show that the Constitutional Court Decision has significant implications for the electoral process in Indonesia, especially in terms of the selection and quality of prospective leaders, by emphasizing the importance of relevant political experience. The concept of amicus curiae shows the contribution of additional perspectives from independent parties that assist the Constitutional Court in considering the practical implications of this decision, as well as ensuring that the decision taken takes into account the broader public interest.

Keywords: *Constitutional Court Decisions, Elections, and Amicus curiae*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI /2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal capres dan cawapres, memunculkan kontroversi karena diduga terpengaruh oleh faktor politik kepentingan tertentu serta dugaan konflik kepentingan di antara hakim MK. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *amicus curiae* dapat diterapkan dalam sengketa pemilu terhadap syarat usia minimal capres/cawapres dan bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal capres/cawapres mempengaruhi proses pemilihan umum di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi signifikan terhadap proses pemilu di Indonesia, khususnya dalam hal seleksi dan kualitas calon pemimpin, dengan menekankan pentingnya pengalaman politik yang relevan. Konsep *amicus curiae* memperlihatkan kontribusi perspektif tambahan dari pihak independen yang membantu Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan implikasi praktis putusan ini, serta memastikan bahwa putusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu, dan Amicus curiae.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berbentuk Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang kendali tertinggi atas kebijakan dan pemerintahan. Namun, dalam sistem ini, pembuatan keputusan atau kebijakan publik sering kali melibatkan proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu lama, sehingga menjadi tantangan tersendiri yang memperlambat kinerja pemerintah. Secara umum, negara-negara demokrasi menganut sistem pemerintahan parlementer, presidensial, atau variasi seperti kuasi parlementer dan kuasi presidensial, yang disesuaikan dengan situasi dan

kondisi masing-masing negara.¹

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan prinsip demokrasi. Demokrasi, yang berasal dari kata Yunani *demos* (rakyat) dan *cratein* (pemerintahan), secara etimologis berarti "pemerintahan oleh rakyat."² Konsep ini menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yang dijalankan secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu yang bebas.³ Menurut Schattschneider, demokrasi adalah kegiatan politik yang bersifat kompetitif, di mana organisasi dan pemimpin bersaing dalam merumuskan kebijakan publik, yang pada gilirannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁴ Sebagai prinsip hidup, demokrasi menjunjung persamaan hak dan kebebasan bagi seluruh warga negara, memastikan keterlibatan mereka dalam menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan bersama.⁵ Dengan demikian, demokrasi memadukan pemerintahan dan rakyat melalui asas "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."⁶

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku secara universal, yaitu berlandaskan konstitusi, menganut asas demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin peradilan yang independen dan tidak memihak.⁷ Dalam negara hukum, kekuasaan negara diatur dan dibatasi oleh hukum, sehingga setiap tindakan penguasa harus tunduk pada prinsip-prinsip

¹Harjono, Deddy. *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 45-48.

²Anshari, M. U. *Tinjauan Hukum Konstitusi Terhadap Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2024), hlm. 100-105.

³Lubis, Todung Mulya. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 25-30.

⁴Hidayat, A. *Peran Amicus curiae dalam Proses Hukum Konstitusi: Perspektif dan Implikasi*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2024), hlm. 50-53.

⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 60-65.

⁶Asitha Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus Shantih A. W., dan Lucy Afrilia. "Politik Dinasti di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2023, hlm. 19.

⁷Prasetyo, E. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Kualitas Kandidat dan Partisipasi Politik." *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2024, hlm. 15-20.

hukum.⁸ Penegakan hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada dasarnya mencerminkan kedaulatan rakyat, yang dalam praktiknya di negara modern diwujudkan melalui sistem perwakilan demokratis yang merepresentasikan kehendak rakyat.⁹

Dalam Pasal 13 huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 menyatakan bahwa persyaratan usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) adalah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.¹⁰ Ketentuan ini bersumber dari Pasal 169 huruf q dalam Undang-undang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum untuk pembentukan peraturan KPU. Persyaratan usia minimum tersebut memegang peranan penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin tertinggi negara. Dengan menetapkan batasan usia minimal, regulasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon presiden atau wakil presiden memiliki tingkat kedewasaan dan pengalaman yang dianggap cukup untuk menjalankan tugas kepemimpinan yang kompleks.¹¹

Permohonan uji materiil pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) yang bernama Almas Tsaqibbirru. Dalam permohonan perkara nomor 90/PUUXXI/2023 tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat

⁸Sari, Retno Dwi. "Political Experience as a Criterion for Presidential Candidates: A Comparative Study." *Journal of Political Science and Public Administration*, Vol. 20, No. 3, Tahun 2023, hlm. 35-40.

⁹Jackson, Vicki C. "Constitutional Law in a Democratic Society," *Harvard Law Review*, Vol. 126, No. 3, Tahun 2013, hlm. 305-310.

¹⁰Dwi Rahmawati. *PKPU 19/2023: Batas Usia Minimal Capres-Cawapres Masih 40 Tahun*. Okt 15, 2023. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/pemilu/d-6983222/pkpu-19-2023-batas-usia-minimal-capres-cawapres-masih-40-tahun>. pada tanggal 01 Januari 2024.

¹¹Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 85-88.

negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Putusan ini cukup menghebohkan dunia politik serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat dengan kepentingan keluarga.¹² Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, meski secara umur cawapres tersebut belum memenuhi syarat, tetapi bisa maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia.

Selain pengujian pembatasan usia capres/cawapres pada permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang telah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa permohonan uji materiil lainnya yang memiliki dalil yang sama, seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUUXXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).¹³

Putusan ini dianggap kontroversial, karena putusan ini dibuat dalam dinamika momentum pilpres 2024. Keputusan ini jelas

¹²Maria Ulfah Anshari. *Hukum Pemilu dan Proses Politik di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020), hlm. 103-106.

¹³Rio Subandri. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024, hlm. 138-139.

memberikan keuntungan kepada salah satu paslon (pasangan calon). Melihat indikator dan logika hukum yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sulit untuk menolak pandangan bahwa ada kecenderungan tersebut. Faktanya, Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap inkonsistensi yang terlihat dengan jelas. Terlebih lagi, dengan objek JR dan petitum yang hampir sama dan diajukan dalam periode waktu yang relatif dekat, yaitu putusan No.29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan perkara 55/PU-XXI/2023 yang berhubungan dengan batas usia dan berakhir dengan penolakan.¹⁴

Salah satu syarat mutlak bagi keberhasilan suatu bangsa adalah adanya kekuasaan yudikatif yang kuat, independen, bebas, dan netral. Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, adanya kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, menekankan adanya pembagian tiga cabang kekuasaan dalam sistem pemerintahan, ketiga cabang tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen yang sangat signifikan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Dalam kerangka konsep negara hukum, kekuasaan kehakiman menjadi fondasi utama yang menentukan cara kerja negara hukum. Prinsip dasarnya adalah jika kinerja kekuasaan kehakiman tidak optimal, akan berdampak buruk pada fungsi negara hukum Indonesia. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga kekuasaan. Penumpukan semacam itu dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena kurangnya mekanisme saling kontrol antar lembaga dan kurangnya keseimbangan di antara lembaga-lembaga negara.¹⁵

¹⁴Taufik Hidayat. "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya terhadap Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2021, hlm. 55-59.

¹⁵Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumi, 1997), hlm. 39.

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Tahun 2024) hingga 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 23 pengajuan permohonan sebagai *Amicus curiae*. *Amicus curiae* secara harfiah berarti “sahabat pengadilan.” Dalam hal ini, pihak-pihak yang merasa berkepentingan dapat memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan meski mereka tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.¹⁶ Pendapat hukum yang diajukan itu tidak bisa dianggap sebagai alat bukti maupun kesaksian. Namun pendapat hukum yang disampaikan sahabat pengadilan bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Hakim bahwa hakim konstitusi “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Munculnya fenomena *Amicus curiae* itu, melambungkan kepedulian masyarakat atas ketidakadilan yang mereka rasakan.¹⁷

Dalam sistem hukum modern, peran pihak ketiga dalam suatu perkara peradilan semakin diperhatikan, salah satunya melalui institusi *amicus curiae*. Istilah “*amicus curiae*”, yang secara harfiah berarti “teman pengadilan”, merujuk pada individu atau organisasi yang bukan pihak yang terlibat langsung dalam suatu perkara, namun memberikan masukan atau pendapat hukum kepada pengadilan mengenai isu-isu hukum yang sedang dibahas dalam suatu kasus tertentu. Konsep ini dimaksudkan untuk membantu pengadilan dengan penyampaian pandangan yang dapat memperkaya pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Amicus curiae memberikan perspektif hukum tambahan, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung kompleksitas hukum

¹⁶Hosen, Nadirsyah. "Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Konstitusi di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2017, hlm. 50-55.

¹⁷Amelia Rahima Sari. *Sahabat Pengadilan di Tenggat Putusan Sengketa Pilpres*. April 20, 2024. Diakses melalui situs: <https://www.tempo.co/politik/amicus-curiae-sengketa-pilpres-409222>. pada 13 Juni 2024.

atau kepentingan publik yang lebih luas. Penggunaan institusi ini secara global semakin diterima dalam berbagai sistem hukum, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun konstitusional, dengan tujuan mendukung objektivitas dan kualitas putusan pengadilan. Dalam konteks Indonesia, walaupun *amicus curiae* belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, terdapat beberapa contoh praktis di mana lembaga atau individu tertentu diberikan kesempatan untuk berperan sebagai *amicus curiae*, misalnya dalam perkara-perkara konstitusional yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Namun demikian, meskipun konsep *amicus curiae* dapat memperkaya substansi peradilan, praktik penerapannya di Indonesia masih terbatas, dan di sisi lain sering kali memunculkan perdebatan mengenai seberapa jauh pihak ketiga bisa turut campur dalam proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas putusan pengadilan dan perkembangan hukum di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, yang dianggap memiliki signifikansi yang tinggi dan relevan untuk diteliti sehingga dapat dituliskan artikel dengan judul sebagai berikut: "*Sengketa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres (Ditinjau menurut Konsep Amicus curiae)*".

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Pokok Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 40-41.

¹⁹Saldi Isra, *Konstitusionalisme di Indonesia: Dari Pemikiran Hingga Perkembangan Praktiknya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 287.

II. METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif).²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).²¹ Dalam penelitian hukum normatif, data dari sumber-sumber hukum tertulis diatur secara terstruktur untuk memudahkan analisis dan kesimpulan.²²

III. PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tinjauan hukum positif terhadap syarat usia minimal capres/cawapres

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menambahkan ketentuan mengenai pengalaman menjabat sebagai bagian dari syarat usia minimal untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Berikut adalah penjelasan lebih rinci:²³

1. Usia Minimal dan Pengalaman Menjabat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa perubahan signifikan dalam persyaratan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebelumnya, syarat usia minimal untuk mencalonkan diri adalah 40 tahun, namun putusan ini menambahkan ketentuan pengalaman menjabat sebagai syarat yang dapat mengurangi usia minimal tersebut. Langkah ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara usia dan pengalaman

²⁰Hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

²¹Pendekatan kasus adalah penelitian yang mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayumedia Publishing 2007), hlm. 321.

²²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm 251-252

²³Lubis, Todung Mulya. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 210.

dalam dunia politik, yang bisa menjadi terobosan penting bagi sistem demokrasi Indonesia.

2. *Penghitungan Pengalaman*

Penghitungan pengalaman menjabat sebagai syarat tambahan untuk usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan aspek kunci dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini memperkenalkan fleksibilitas yang signifikan dalam persyaratan pencalonan dengan memperhitungkan pengalaman politik sebagai alternatif terhadap usia minimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis terhadap mekanisme penghitungan pengalaman ini penting untuk memahami bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi proses pemilihan dan kualifikasi calon.²⁴

Secara praktis, penghitungan pengalaman menjabat akan melibatkan penilaian yang cermat terhadap durasi dan jenis pengalaman yang dimiliki oleh calon. Misalnya, seorang calon yang berusia 35 tahun dan telah menjabat sebagai anggota DPR selama lima tahun dapat dihitung sebagai memenuhi syarat usia minimal. Perhitungan ini mengacu pada prinsip bahwa pengalaman yang diperoleh dalam posisi politik memiliki nilai yang setara dengan tambahan usia yang diperlukan. Ini berarti pengalaman menjabat berfungsi sebagai pengganti atau pengurang dari syarat usia minimal yang ditetapkan.

Untuk mengimplementasikan mekanisme ini secara efektif, perlu ada pedoman yang jelas mengenai bagaimana pengalaman tersebut dihitung dan diakui. Hal ini termasuk penetapan standar mengenai jenis pengalaman yang memenuhi syarat, serta bagaimana durasi pengalaman tersebut dikonversi menjadi pengurangan usia minimal. KPU (Komisi Pemilihan Umum) harus menetapkan kriteria yang jelas

²⁴Harjono, Deddy. *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 10.

dan objektif untuk menilai pengalaman menjabat, agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda atau subjektivitas dalam proses penetapan calon.

Secara keseluruhan, mekanisme penghitungan pengalaman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa syarat usia minimal dapat disesuaikan dengan pengalaman politik yang relevan. Dengan pedoman yang jelas dan proses verifikasi yang ketat, diharapkan sistem ini dapat mengakomodasi calon yang berkompeten dan mendorong kualitas kepemimpinan yang lebih baik di masa depan.²⁵

3. Tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia dengan menambahkan pengalaman menjabat sebagai syarat tambahan untuk usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dengan memasukkan pengalaman menjabat sebagai faktor yang dapat mengurangi syarat usia, putusan ini mengakui bahwa pengalaman politik yang relevan merupakan indikator penting dari kompetensi calon. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa calon pemimpin tidak hanya memenuhi syarat usia tetapi juga memiliki rekam jejak yang menunjukkan kemampuan dalam pemerintahan.

Selain itu, putusan ini berusaha memberikan ruang bagi generasi muda yang telah memperoleh pengalaman politik signifikan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan membuka peluang bagi calon yang lebih muda namun berpengalaman, diharapkan akan muncul perspektif baru dan inovatif dalam kepemimpinan nasional. Ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara usia dan pengalaman,

²⁵Lubis, Todung Mulya. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 210.

serta mendorong keterlibatan politik yang lebih luas dan inklusif.²⁶

4. Implementasi dalam Pemilu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Untuk memastikan penerapan yang adil dan konsisten, KPU harus melakukan verifikasi yang cermat terhadap klaim pengalaman menjabat dari calon. Ini mencakup pemeriksaan dokumentasi dan bukti-bukti yang mendukung pengalaman tersebut, serta evaluasi terhadap relevansi dan substansi dari posisi yang telah dijabat. Pedoman yang jelas harus dikembangkan untuk menentukan jenis pengalaman yang memenuhi syarat dan bagaimana pengalaman tersebut dapat mengurangi usia minimal calon.²⁷

Selain itu, KPU perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, termasuk panitia pemilihan di tingkat lokal, memahami dan dapat mengimplementasikan ketentuan baru ini dengan baik. Sosialisasi yang efektif akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua calon diperlakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan langkah maju dalam reformasi sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Dengan menambahkan ketentuan pengalaman sebagai syarat tambahan usia minimal, putusan ini berupaya menyeimbangkan antara usia dan pengalaman, serta memberikan peluang bagi individu muda yang berkompeten untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Diharapkan, perubahan ini akan berdampak positif pada kualitas kepemimpinan di masa depan dan mendorong keterlibatan politik yang lebih luas dan

²⁶Sutrisno, T. Eko. *Reformasi Hukum dan Sistem Pemilihan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2021), hlm. 49.

²⁷Siahaan, M. N. "Verifikasi dan Penetapan Calon dalam Pemilu: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 335-356.

inklusif.

Dalam sistem hukum dan politik Indonesia, keberadaan syarat usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden telah lama menjadi salah satu ukuran untuk menilai kedewasaan dan kesiapan seorang calon pemimpin. Aturan ini telah mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan utama dari penetapan batas usia ini adalah untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki kualifikasi yang cukup untuk memimpin negara, seperti pengalaman dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Penetapan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia tidak hanya mencerminkan kekhawatiran tentang potensi ketidakdewasaan atau kurangnya pengalaman, tetapi juga bertujuan untuk memastikan kesiapan pemimpin dalam menghadapi kompleksitas tugas kepemimpinan. Seiring dengan semakin rumitnya urusan politik domestik dan hubungan internasional, pemimpin yang berpengalaman dianggap lebih mampu membuat keputusan strategis yang tepat. Oleh karena itu, batasan usia ini berfungsi sebagai langkah pencegahan, memastikan bahwa calon pemimpin memiliki waktu yang cukup untuk mengasah pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani tantangan politik yang beragam dan kompleks.²⁸

Pada Pasal Undang-Undang Nomor Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedianya berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40." Regulasi ini menegaskan bahwasanya usia 40 tahun cukup matang dan dewasa untuk memimpin bangsa ini, yang

²⁸*Ibid.* hlm. 2922.

sebaiknya tidak perlu diubah.

Menurut Maria Ulfah Anshari, seorang ahli hukum konstitusi terkemuka, syarat usia minimal untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk menjamin kedewasaan dan kematangan calon dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Usia minimal 40 tahun yang ditetapkan dalam UUD 1945, menurutnya, mencerminkan kebutuhan untuk memastikan bahwa calon telah memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup dalam pengelolaan negara dan pemerintahan. Pengalaman ini dianggap penting karena posisi presiden dan wakil presiden memerlukan kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang berdampak besar pada negara.²⁹

Maka secara keseluruhan, pandangan ahli ini menunjukkan bahwa syarat usia minimal untuk capres dan cawapres penting untuk menjaga kedewasaan dan kematangan kepemimpinan, juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan praktis dan dinamika politik saat ini. perubahan peraturan terkait syarat usia capres dan cawapres mengurangi fleksibilitas dan kualitas calon pemimpin.

B. Implementasi konsep *amicus curiae* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Amicus curiae dikenal sebagai "*friends of court*" atau sahabat pengadilan, merupakan masukan yang diberikan oleh individu atau organisasi yang tidak memiliki status sebagai pihak dalam perkara hukum, namun memiliki minat atau kepentingan terhadap suatu kasus tertentu. Ini berfungsi sebagai tambahan informasi atau pandangan hukum yang disampaikan kepada pengadilan untuk mendukung proses

²⁹Anshari, M. U. *Tinjauan Hukum Konstitusi Terhadap Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2024), hlm. 39.

pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.³⁰ Ketika lebih dari satu individu atau sekelompok orang menjadi *Amicus curiae*, mereka disebut sebagai *Amicus curiae*, sementara pengajuannya disebut sebagai *Amici(s)*.³¹

Penggunaan *Amicus curiae* oleh hakim tidak hanya sebagai bahan referensi untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan sudut pandang tambahan dari berbagai ahli atau kelompok kepentingan yang relevan dalam kasus tersebut. Hal ini dapat memperkaya proses pengambilan keputusan hukum dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam, meningkatkan transparansi serta keadilan dalam penegakan hukum.

Hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan berbagai informasi dan kesempatan untuk mendengar pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. *Amicus curiae* berbeda dari pihak yang berintervensi karena mereka tidak berpartisipasi langsung dalam kasus tersebut, namun memberikan kontribusi berupa sudut pandang tambahan yang relevan bagi pengadilan.

Sistem pembuktian mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, ciri-ciri masing-masing alat bukti, serta prosedur untuk mempresentasikan alat bukti di pengadilan. Sistem ini juga menetapkan cara hakim membentuk keyakinan berdasarkan bukti yang diajukan dalam sidang, yang menjadi elemen penting dalam mencapai keadilan.³²

Ketika sebuah organisasi mengajukan *Amicus curiae* dalam persidangan dan diterima oleh hakim, mereka diperkenankan menyampaikan pandangan mereka, namun tidak memiliki hak untuk membantah argumen yang diajukan oleh pihak lainnya. Pihak yang

³⁰Ni Putu Widyarningsih, "Amicus curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm. 1095.

³¹Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, (Jakarta: Canting Press 2014), hlm. 14.

³²Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana" *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm. 24.

mengajukan *Amicus curiae* tidak harus seorang pengacara, melainkan bisa juga seorang individu dengan pengetahuan yang relevan terhadap kasus tersebut, sehingga keterangannya dianggap penting untuk pengadilan. *Amicus curiae* dapat memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan dalam persidangan, dengan dokumen tertulis yang diajukan sering disebut sebagai *Amicus Brief*.

Amicus curiae dapat memberikan keterangan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pengadilan, namun harus mendapat izin dari ketua pengadilan. Tujuan dari pemberian keterangan ini adalah untuk mendukung proses pemeriksaan dan memberikan kontribusi dalam bentuk partisipasi. Keterangan yang diberikan bisa berupa penjelasan fakta maupun pandangan hukum dan ilmiah. Penggunaan *Amicus curiae* dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dapat dibenarkan dalam teori, karena hakim perlu mempertimbangkan keseimbangan antara undang-undang yang berlaku dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Sebagai contoh, pertimbangan ini mencakup kepentingan masyarakat umum, terdakwa, serta faktor lainnya. Pengajuan *Amicus curiae* sering kali bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas dari masyarakat.

Keuntungan *Amicus curiae* terbatas pada memberikan pandangan atau opini hukum. *Amicus curiae* bukan merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang diperoleh dari bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu, peran *Amicus curiae* lebih berfokus pada memberikan perspektif hukum tambahan yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.³³

Dengan memperoleh berbagai informasi dan pandangan yang

³³Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia 2013), hlm. 173.

berbeda, hakim dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana. Dalam proses penentuan putusan, hakim harus selalu memperhatikan tiga aspek utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keseimbangan antara ketiga aspek tersebut harus dijaga dengan cermat, sehingga putusan yang diambil dapat memenuhi standar keadilan yang diharapkan dalam sistem hukum.

1. Kerangka Hukum dan Teori *Amicus curiae*

a. Pengertian dan Fungsi

- 1) *Amicus curiae* adalah individu atau organisasi yang mengajukan pendapat hukum, analisis, atau data tambahan kepada pengadilan dengan tujuan membantu pengadilan memahami implikasi yang lebih luas dari keputusan hukum yang akan diambil.
- 2) Fungsi utamanya adalah memberikan perspektif independen dan informasi tambahan yang mungkin tidak disediakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara.

b. Regulasi dan Praktik di Indonesia

- 1) Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, peran *Amicus curiae* telah diakui dan diterima dalam praktik peradilan di Indonesia.
- 2) Mahkamah Konstitusi sering menerima masukan dari berbagai organisasi non-pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional yang bertindak sebagai *Amicus curiae*.

2. Konsep *Amicus curiae* terhadap putusan

- a. Kontribusi *Amicus curiae*: Dalam perkara ini, beberapa organisasi dan individu yang bertindak sebagai *Amicus curiae* mengajukan analisis tentang pentingnya pengalaman menjabat bagi calon presiden dan wakil presiden. Mereka memberikan perspektif tentang bagaimana pengalaman menjabat dapat mempengaruhi

kinerja kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan.

- b. Pengaruh terhadap Keputusan Mahkamah: Masukan dari *Amicus curiae* membantu Mahkamah dalam memahami implikasi praktis dari penambahan syarat pengalaman menjabat. Mahkamah mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh *Amicus curiae* mengenai pentingnya pengalaman politik dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan efektivitas pemerintahan.³⁴

Menurut Arief Hidayat, seorang ahli hukum konstitusi yang terkemuka, menilai bahwa peran *Amicus curiae* sangat penting dalam proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, *Amicus curiae*, atau “teman pengadilan,” adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara tetapi memberikan informasi atau argumen tambahan yang relevan untuk membantu pengadilan dalam menilai kasus. Prof. Hidayat menekankan bahwa kontribusi dari *Amicus curiae* dapat memperluas perspektif MK dengan memberikan pandangan dari berbagai bidang keahlian, sehingga keputusan yang diambil lebih komprehensif dan berimbang.³⁵

Prof. Hidayat berpendapat bahwa peran *Amicus curiae* sangat krusial dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu konstitusi yang kompleks atau belum pernah dihadapi sebelumnya. Melalui sumbangan informasi yang mendalam dan analisis yang tajam, *Amicus curiae* dapat membantu MK dalam memahami implikasi hukum dan sosial dari putusan yang akan diambil. Hidayat percaya bahwa keterlibatan *Amicus curiae* memperkuat transparansi dan legitimasi proses hukum, serta memastikan bahwa keputusan MK tidak hanya berdasarkan argumen dari pihak-pihak yang berperkara tetapi juga mempertimbangkan sudut pandang eksternal yang relevan.

³⁴Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 82.

³⁵Hidayat, A. *Peran Amicus curiae dalam Proses Hukum Konstitusi: Perspektif dan Implikasi*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2024), hlm. 11.

Sementara menurut Rina Wiryani, seorang ahli hukum internasional, mengemukakan bahwa peran *Amicus curiae* dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah contoh penerapan praktik hukum internasional yang baik. Menurut Wiryani, *Amicus curiae* memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa putusan MK tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak dalam perkara tetapi juga melibatkan perspektif dari para ahli dan lembaga yang memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus mengenai isu yang sedang dibahas. Hal ini, menurutnya, membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan.³⁶

Wiryani menyoroti bahwa dalam konteks hukum internasional, *Amicus curiae* sering digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang praktik dan standar internasional yang relevan. Begitu pula dalam konteks nasional, *Amicus curiae* dapat berfungsi untuk mengisi kekosongan informasi dan memberikan wawasan yang mungkin tidak tersedia melalui pihak-pihak berperkara. Dia menganggap bahwa peran ini sangat penting dalam menguatkan kualitas dan kedalaman putusan MK, serta dalam mendukung keadilan dan kepastian hukum.

Maka secara keseluruhan, baik Hidayat maupun Wiryani sepakat bahwa *Amicus curiae* memainkan peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, dengan memberikan informasi tambahan dan sudut pandang yang berharga untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adalah adil dan berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh.

Kedudukan *Amicus curiae* dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia adalah sebagai pihak yang independen dan

³⁶Wiryani, R. *Hukum Internasional dan Amicus curiae: Kontribusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Bandung: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2024), hlm. 58.

tidak terlibat langsung dalam perkara yang sedang dibahas. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hasil persidangan, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan melalui pandangan, analisis, dan informasi yang relevan. Kehadiran *Amicus curiae* dimaksudkan untuk membantu MK dalam memahami aspek-aspek tertentu dari kasus yang mungkin tidak dijelaskan secara mendetail oleh para pihak yang berperkara.

Amicus curiae berperan sebagai penasihat yang memberikan masukan kepada hakim konstitusi. Mereka biasanya terdiri dari pakar hukum, akademisi, organisasi non-pemerintah, atau institusi lain yang memiliki keahlian khusus dalam isu konstitusional yang dibahas. Dalam memberikan masukan, *Amicus curiae* mengedepankan kepentingan umum dan integritas hukum, memastikan bahwa perspektif yang lebih luas dan mendalam dapat dipertimbangkan oleh MK dalam membuat keputusan.³⁷

Penerimaan *Amicus curiae* dalam persidangan MK diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka tidak memiliki hak untuk memutuskan atau memengaruhi secara langsung hasil akhir dari perkara. Namun, pendapat dan informasi yang diajukan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikiran hakim dalam mengevaluasi dan menimbang aspek-aspek hukum yang relevan. Hal ini membantu memastikan bahwa putusan yang diambil adalah berdasarkan analisis yang komprehensif dan mendalam.³⁸

³⁷Luthan, E. Peranan *Amicus curiae* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, 2013, hlm. 477-496.

³⁸Siahaan, M. N. *Amicus curiae* dan Peranannya Dalam Peradilan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 209-227.

C. Tinjauan Amicus Curiae Terhadap Sengketa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres Menurut Konsep *Amicus Curiae*

Amicus curiae merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan modern yang bertujuan untuk memperkaya pertimbangan hukum hakim melalui masukan independen. Konsep ini telah lama dikenal dalam tradisi hukum *common law*, tetapi dalam beberapa dekade terakhir penggunaannya juga meluas ke berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, peran *amicus curiae* menjadi relevan karena putusan tersebut melibatkan isu-isu konstitusional yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan sistem politik di Indonesia.

Putusan MK ini memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang belum mencapai usia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri jika memiliki pengalaman menjabat melalui pemilu. Keputusan ini telah memicu berbagai kontroversi, mulai dari tuduhan keberpihakan politik hingga kekhawatiran akan penguatan oligarki. Dalam perkara ini, *amicus curiae* berfungsi untuk memberikan perspektif tambahan tentang implikasi keputusan tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan sosial. Menurut Indriyanto Seno Adji, *amicus curiae* adalah instrumen yang dapat membantu hakim untuk melihat sebuah perkara dari sudut pandang yang lebih luas, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan isu kebijakan publik yang sensitif.³⁹

Dalam praktiknya, *amicus curiae* berperan memberikan analisis hukum yang bersifat obyektif dan independen. Dalam perkara ini, sejumlah masukan dari *amicus curiae* telah menyoroti potensi masalah

³⁹Indriyanto Seno Adji, *Hakim Konstitusi dan Etika Judicial: Pengaruh Terhadap Independensi dan Keputusan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 87.

yang muncul akibat ketentuan tambahan pengalaman menjabat sebagai pengganti syarat usia minimal. Salah satu kritik utama adalah bahwa ketentuan ini dapat mempersempit akses kelompok tertentu ke dalam kontestasi politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Achmad Ali, fleksibilitas hukum yang tidak dirumuskan secara hati-hati dapat membuka ruang bagi manipulasi politik dan melemahkan prinsip kesetaraan.⁴⁰ Dalam konteks ini, *amicus curiae* memiliki peran strategis untuk mengingatkan hakim tentang konsekuensi sosial dan politik dari putusan yang diambil.

Amicus curiae juga berfungsi untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Dalam perkara ini, masukan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa keputusan MK dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Menurut Bagir Manan, *amicus curiae* memiliki potensi untuk memperbaiki persepsi publik terhadap pengadilan dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.⁴¹ Namun, dalam kasus ini, masukan dari *amicus curiae* tidak tampak secara eksplisit dalam pertimbangan MK, yang menimbulkan kritik bahwa mekanisme ini hanya digunakan sebagai formalitas.

Salah satu tantangan terbesar dalam perkara ini adalah dugaan konflik kepentingan yang melibatkan beberapa hakim MK. Situasi ini semakin memperburuk persepsi publik bahwa putusan tersebut tidak independen. Santhi Faisal menyatakan bahwa keberadaan *amicus curiae* dapat menjadi penyeimbang dalam situasi seperti ini, di mana hakim diharapkan untuk mempertimbangkan masukan independen sebagai

⁴⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 105.

⁴¹Bagir Manan, "Penguatan Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2019, hlm. 55.

upaya untuk menjaga integritas proses peradilan.⁴² Namun, tanpa mekanisme yang tegas untuk memastikan bahwa masukan dari *amicus curiae* dipertimbangkan secara serius, kontribusi mereka menjadi terbatas.

Fenomena yang muncul dalam perkara ini juga menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan Indonesia. Margaretha Ginting mengemukakan bahwa keberhasilan *amicus curiae* sangat bergantung pada adanya aturan yang mengikat hakim untuk mempertimbangkan masukan mereka dalam putusan.⁴³ Dalam konteks ini, peraturan yang lebih spesifik dapat membantu memastikan bahwa masukan dari *amicus curiae* benar-benar menjadi bagian dari analisis hukum yang dilakukan oleh hakim.

Dari perspektif etika *judicial*, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hakim harus berperan sebagai penjaga keadilan yang independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu.⁴⁴ Dalam perkara ini, absennya referensi eksplisit terhadap masukan *amicus curiae* menunjukkan adanya kelemahan dalam integritas proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan sistem demokrasi, Putusan MK ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana institusi hukum harus berfungsi untuk melindungi prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro, keputusan yang menyangkut isu konstitusi harus mempertimbangkan dampaknya

⁴²Santhi Faisal, "Amicus Curiae Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, Tahun 2014, hlm. 34.

⁴³Margaretha Ginting, *Etika Judicial di Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Pada Perkara Konstitusi yang Berimplikasi Politik*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2016), hlm. 90.

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2005), hlm. 88.

terhadap tatanan sosial dan politik.⁴⁵ Dalam hal ini, masukan *amicus curiae* dapat membantu pengadilan untuk memahami implikasi jangka panjang dari sebuah keputusan, termasuk risiko-risiko yang mungkin muncul.

Apabila putusan hakim konstitusi tidak sesuai dengan prinsip *Rule of Law*, berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi, baik pada tingkat individu maupun sistemik seperti erosi kepercayaan publik, rasa ketidakadilan, adanya penyalahgunaan kekuasaan dan berdampak pada reformasi hukum. Ketidakpatuhan terhadap *Rule of Law* dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Masyarakat yang merasa bahwa hukum tidak ditegakkan dengan adil mungkin melakukan protes, demonstrasi, atau bahkan pemberontakan terhadap pemerintah dan sistem hukum.⁴⁶

Amicus curiae telah memberikan kontribusi penting dalam beberapa kasus di Indonesia, menunjukkan potensinya untuk memengaruhi putusan pengadilan ketika argumen yang diajukan relevan dan kuat. Salah satu contoh keberhasilannya adalah dalam kasus Salim Kancil dan Tosan (2016), di mana LBH Jakarta berperan sebagai *amicus curiae*. Dalam kasus ini, masukan berupa argumen pelanggaran hak asasi manusia dan dampaknya terhadap korban membantu hakim memahami implikasi yang lebih luas, sehingga mendorong putusan yang lebih adil terhadap pelaku pelanggaran. Kasus lain yang menonjol adalah kasus Reyndhart Rossy (2020), di mana *amicus curiae* berhasil mendorong pengadilan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penggunaan ganja medis. Argumentasi ini

⁴⁵Mardjono Reksodiputro, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Sistem Hukum yang Demokratis," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2018, hlm. 25.

⁴⁶Pramesti Ratu Fiqih, Adellia Mahardika Widodo, Anisa Miftahul Firdaus, "Analisis Penerapan *Rule Of Law* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution* (Studi Pada Kasus Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023) *Journal of Social Studies and Education*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2024, hlm 238-249.

menyoroti pentingnya penelitian ilmiah dan mengubah pandangan hakim terhadap isu tersebut.⁴⁷

Keberhasilan *amicus curiae* dalam memengaruhi putusan pengadilan biasanya bergantung pada beberapa faktor kunci, termasuk kekuatan argumen, relevansi data, dan konteks sosial yang mendukung peran tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, meskipun terdapat 33 pengajuan *amicus curiae* terkait sengketa hasil Pemilihan Umum (Pilpres) 2024, masukan tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan. Salah satu faktor utamanya adalah adanya dugaan konflik kepentingan yang memengaruhi independensi hakim dalam memutuskan perkara. Konflik kepentingan ini menjadi penghalang serius bagi hakim untuk secara objektif mempertimbangkan masukan dari *amicus curiae*.

Kondisi ini mencerminkan bagaimana konflik kepentingan dapat mengurangi efektivitas *amicus curiae* sebagai alat untuk memperluas pandangan hakim. Selain itu, kurangnya standar regulasi yang tegas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas hakim dalam mempertimbangkan masukan *amicus curiae*. Kegagalan *amicus curiae* dalam memengaruhi putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang memadai di Indonesia, sehingga sering kali hanya menjadi formalitas dalam proses peradilan konstitusional.

Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap demokrasi adalah adanya kemunduran kinerja Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Terbukanya ruang intervensi dalam pengambilan keputusan dan benturan kepentingan

⁴⁷Topan Yuniarto. *Rekam Jejak Amicus Curiae di Indonesia*, Mei 16, 2024. Diakses melalui situs: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/rekam-jejak-amicus-curiae-di-indonesia>. pada tanggal 2 Desember 2024.

hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 menjadi salah satu faktor kemunduran demokrasi dan hilangnya marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan.⁴⁸

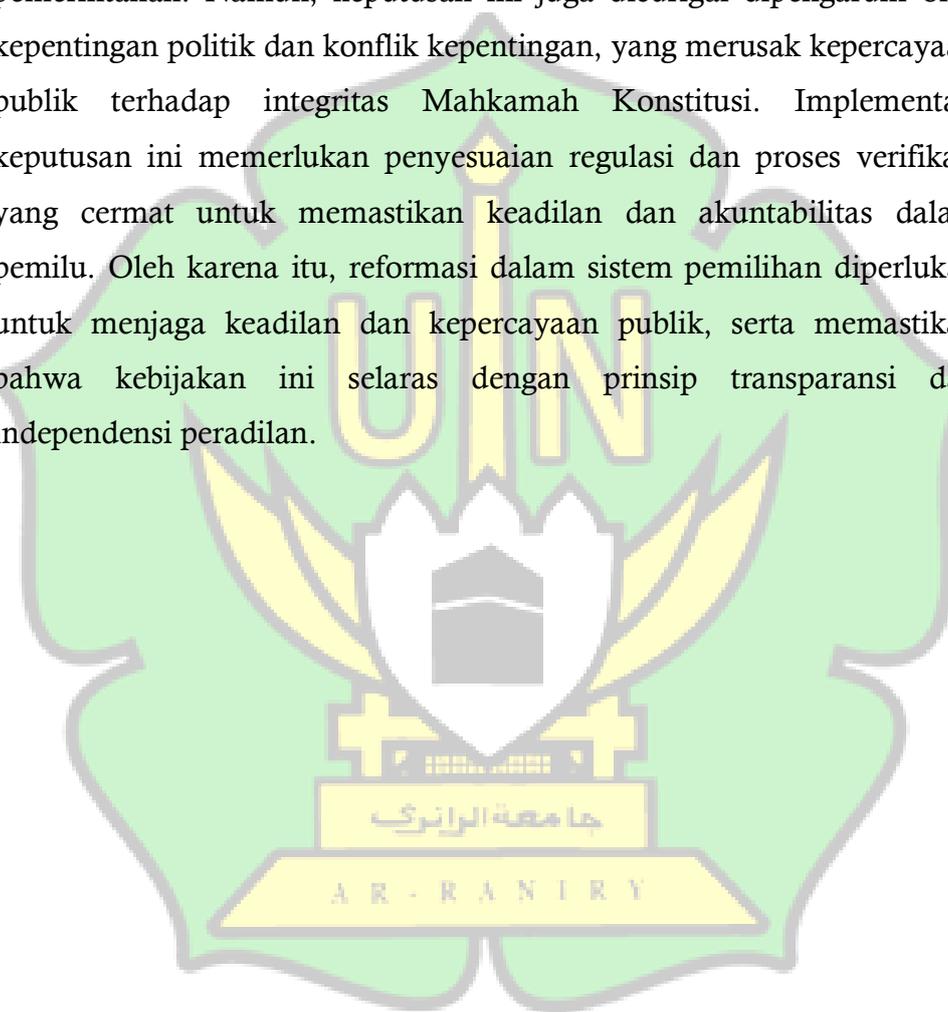
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdampak terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, dengan berbagai implikasi hukum, sosial, dan politik. Di satu sisi, putusan ini berupaya meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui penekanan pada pengalaman politik. Namun, di sisi lain, putusan ini memicu kekhawatiran terhadap prinsip demokrasi, inklusivitas, dan keadilan hukum. Munculnya dugaan konflik kepentingan serta penguatan oligarki politik semakin memperkeruh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengevaluasi kembali implementasi putusan ini, termasuk penguatan regulasi dan sistem verifikasi yang transparan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan reformasi pemilu tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi utama negara hukum Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memperkenankan calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri asalkan memiliki pengalaman menjabat melalui pemilihan umum, telah menimbulkan berbagai dampak signifikan. Dari perspektif *Amicus curiae*, peran mereka dalam

⁴⁸Retno Maria Palupi, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2024, hlm.57-58.

perkara ini untuk membantu Mahkamah dalam memahami implikasi praktis dari syarat pengalaman menjabat, memberikan analisis tentang pentingnya pengalaman tersebut bagi calon presiden dan wakil presiden. Pendapat hukum dari *Amicus curiae* menunjukkan bahwa pengalaman politik dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan efektivitas pemerintahan. Namun, keputusan ini juga dicurigai dipengaruhi oleh kepentingan politik dan konflik kepentingan, yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas Mahkamah Konstitusi. Implementasi keputusan ini memerlukan penyesuaian regulasi dan proses verifikasi yang cermat untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pemilu. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pemilihan diperlukan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa kebijakan ini selaras dengan prinsip transparansi dan independensi peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshari, M. U. *Tinjauan Hukum Konstitusi Terhadap Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2024.
- Achmad, A. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adji, I. S. *Hakim Konstitusi dan Etika Judicial: Pengaruh Terhadap Independensi dan Keputusan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Anshari, M. U. *Hukum Pemilu dan Proses Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020.
- Aminah, S. *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: Canting Press, 2014.
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Effendi, T. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Ginting, M. *Etika Judicial di Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Pada Perkara Konstitusi yang Berimplikasi Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Harjono, D. *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2022.
- Hidayat, A. *Peran Amicus Curiae dalam Proses Hukum Konstitusi: Perspektif dan Implikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2024.
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Jackson, V. C. "Constitutional Law in a Democratic Society." *Harvard Law Review*, 126(3), 305–310, 2013.
- Lubis, T. M. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Manan, B. & Magnar, K. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahardjo, S. *Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2005.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.

- Sutrisno, T. E. *Reformasi Hukum dan Sistem Pemilihan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Wiryaningrum, R. *Hukum Internasional dan Amicus Curiae: Kontribusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2024.

B. Jurnal dan Skripsi

- Faisal, S. "Amicus Curiae sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 34, 2014.
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. "Analisis Penerapan Rule of Law oleh Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution (Studi pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *Journal of Social Studies and Education*, 1(3), 2024.
- Hosen, N. "Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Konstitusi di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 19(1), 50–55, 2017.
- Luthan, E. Peranan Amicus Curiae dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 2013.
- Manan, B. "Penguatan Peran Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, 10(2).
- Palupi, R. M. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1(1), 2024.
- Prasetyo, E. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Kualitas Kandidat dan Partisipasi Politik." *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 12(1), 2024.
- Rozi, F. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 2018.
- Reksodiputro, M. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Sistem Hukum yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 6(1).
- Syanur, A. D. M., Shantih, I. B. S. A. W., & Afrilia, L. "Politik Dinasti di Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Penerapan Demokrasi di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Subandri, R. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 138–139, 2024.

- Sari, R. D. "Political Experience as a Criterion for Presidential Candidates: A Comparative Study." *Journal of Political Science and Public Administration*, 20(3), 2023.
- Siahaan, M. N. "Amicus Curiae dan Peranannya Dalam Peradilan Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 2015.
- Siahaan, M. N. "Verifikasi dan Penetapan Calon dalam Pemilu: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(4), 2021.
- Widyaningsih, N. P. "Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak sebagai Pengguna Narkotika." *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 2020.

C. Internet

- Rahmawati, D. "PKPU 19/2023: Batas Usia Minimal Capres-Cawapres Masih 40 Tahun." Diakses melalui situs:<https://news.detik.com/pemilu/d-6983222/pkpu-19-2023-batas-usia-minimal-capres-cawapres-masih-40-tahun>. 2023.
- Sari, A. R. "Sahabat Pengadilan di Tenggat Putusan Sengketa Pilpres." Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/amicus-curiae-sengketa-pilpres-409222>, 2024.
- Yuniarto, T. "Rekam Jejak Amicus Curiae di Indonesia." Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/rekam-jejak-amicus-curiae-di-indonesia>, 2024.

